

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sangat krusial diberbagai daerah, Menurut Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studie dalam (Karunia, 2021) angka kemiskinan di Indonesia akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan pada tahun ini, yakni sekitar 10.81% atau 29,3 juta penduduk. Angka tersebut sangatlah besar mengingat pada tahun tahun sebelumnya kemiskinan sering menjadi momok bagi banyak masyarakat, tak terkecuali di kota Yogyakarta. Hal tersebut menjadi hal yang sulit dihadapi oleh semua kalangan khususnya pihak yang menjadi garda terdepan yakni pemerintah kota Yogyakarta. Dalam membangun masyarakat yang makmur secara menyeluruh membutuhkan fokus dan kerja sama yang baik dengan semua sektor masyarakat untuk mencapai stabilitas sosial guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. hal ini jelas membutuhkan peran masyarakat untuk melibatkan diri dalam mempromosikan pembangunan dan mengembangkan kualitas SDM guna kemajuan diberbagai sektor tak terkecuali sektor Pariwisata.

Seperti yang kita ketahui kota Yogyakarta merupakan salah satu kota wisata yang gemar dikunjungi oleh masyarakat karena berbagai keanekaragaman budayanya yang melekat serta wisata yang khas hal ini terbukti dengan persentase kedatangan wisatawan dari tahun ketahun, sudah seharusnya Kota Yogyakarta memiliki kesempatan yang tinggi untuk meningkatkan sektor pariwisatanya.

Salah satu keanekaragaman budaya dan wisata di Yogyakarta tergambar dengan adanya desa wisata Kasongan, desa wisata kasongan adalah salah satu desa wisata di Yogyakarta tepatnya berada di kabupaten Bantul yang menyajikan Pengembangan pariwisata di Desa dengan memanfaatkan mata pencaharian masyarakat yakni sebagai pengrajin gerabah. Di desa wisata kasongan sendiri sekarang telah terdapat wisata edukasi yang mana menyajikan pengalaman bagi pengunjung untuk mencoba secara langsung proses pembuatan kerajinan gerabah nantinya selain mencoba secara langsung dalam proses pembuatannya pengunjung juga akan diajak untuk jalan-jalan ke kampung melihat proses pembuatan tanah liat, tempat pembakaran, finishing gerabah, dan sejarah kampung Kasongan dengan berziarah ke makam cikal bakal kampung Kasongan. Wisata edukasi gerabah Nangsib Keramik buka setiap hari dari jam 08.00 WIB – 17.00 WIB.

Kehadiran pariwisata di Desa Wisata Kasongan tidak mengubah mata pencaharian masyarakat sebagai pengrajin dan penjual gerabah, namun justru menjadi pelengkap dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Kondisi yang terjadi di Desa Wisata Kasongan saat ini dominan pada upaya memenuhi pasokan industri gerabah sebagai sebuah komoditas perdagangan daripada tujuan pengembangan pariwisatanya. Padahal Desa Wisata Kasongan memiliki potensi budaya yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kerajinan gerabah. Pariwisata di Desa Wisata Kasongan tidak hanya menarik dari sisi produk kerajinannya saja tapi juga sejarah dan budaya masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan pariwisata

khususnya pariwisata budaya yang tidak hanya menempatkan wisatawan sebagai “penonton” atau penikmat saja (woro swesti dkk.2020)

Dari keterangan diatas seharusnya masyarakat di desa wisata kasongan dapat hidup makmur karna menjalankan sektor pariwisata yang diiringi dengan bisnis Namun, jika ditelusuri lebih jauh masyarakat desa wisata kasongan tidak cukup bisa dikatakan sejahtera hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Bantul yang merupakan kabupaten ke-3 dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Yogyakarta, berikut adalah datanya:

Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin (Persen)		
	2020	2019	2018
DI Yogyakarta	12.28	11.70	12.13
Kulonprogo	18.01	17.39	18.30
Bantul	13.50	12.92	13.43
Gunungkidul	17.07	16.61	17.12
Sleman	8.12	7.41	7.65
Yogyakarta	7.27	6.84	6.98

Subjek, Subject	Keterangan	Notes
("Persentase Penduduk Miskin"; "Percentage of the Poor")	Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi D I Yogyakarta	National Socio-Economics Survey, BPS-Statistics of D I Yogyakarta Province

Gambar 1.1 Data Angka Kemiskinan di DIY

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul

Hal ini lah yang akan menjadi pokok permasalahan penelitian yang akan diteliti lebih jauh lagi yang melihat sejauh apa program yang dikeluarkan pemerintah setempat untuk mendukung dan mengurangi angka kemiskinan di desa wisata kasongan yang terletak di kabupaten Bantul dengan memanfaatkan berbagai media seperti

pemanfaatan ekonomi kreatif atau penggunaan social media sebagai langkah dalam pengentasan kemiskinan dengan pengembangan pariwisata di daerah tersebut, melihat program yang dilakukan sejauh ini belum maksimal karna pemerintah setempat belum memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan wisata desa kasongan.

1.2. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu luas dan tetap mengarah sesuai dengan judul yang diambil, maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam hal ini penulis berfokus pada apa program yang dilakukan pemerintah setempat dalam pengentasan kemiskinan melalui pengembangan wisata di Desa Kasongan.

1.3. Rumusan Masalah

Provinsi DIY dikenal dengan jumlah wisatanya yang beragam serta khas, akan tetapi dalam hal ini provinsi DIY juga dikenal dengan salah satu provinsi yang miskin di Pulau Jawa. Dengan potensi pariwisata diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di DIY. Desa Kasongan adalah salah satu destinasi wisata desa yang ada di Yogyakarta yang belum banyak diketahui dan belum maksimal pengelolaannya, padahal desa wisata kasongan memiliki potensi yang sangat baik bagi sector pariwisata, adapun berkaitan dengan hal tersebut dan latar belakang yang sudah disampaikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana dan Apa program yang dikeluarkan oleh pemerintah Kalurahan Bangunjiwo dan Pengelola Desa Wisata Kasongan untuk mengembangkan desa wisata kasongan sebagai alat pengentasan kemiskinan ?.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah dan program apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk dapat mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan sector pariwisata, khususnya di Desa wisata Kasongan Kabupaten Bantul Yogyakarta.

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penelitian ini penulis mencoba menyelesaikan penelitian dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan manfaat diantaranya

1.5.1 Teoritis

Secara Teoritis adapun kegunaan penelitian ini yakni diharapkan dapat menambah wawasan ilmu di Lingkup pemerintahan dan sector pariwisata. Khususnya dalam melihat program apa yang dikeluarkan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan Pariwisata sebagai upaya pengentasannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji fenomena yang serupa, selain itu dapat menjadikan sumber bacaan dan pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat dan elemen lainnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai kajian atau referensi untuk memperbaiki strategi yang sudah ada Sehingga dapat menjadi evaluasi maupun tawaran solusi dalam pembuatan kebijakan dalam

pengembangan desa wisata sebagai alat pengentasan kemiskinan. Selain itu hasil penelitian ini sebagai kritik dan saran kepada pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan agar mampu bersinergi dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dan dalam pembuatan kebijakan dengan tepat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat terkait program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dengan pengembangan di bidang pariwisata

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi peneliti yang akan mengkaji hal yang serupa, mengingat kawasan desa wisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup banyak. Selain itu dapat sebagai bahan bacaan dan penambah wawasan bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.6.Literature Review

Berdasarkan topic yang akan diteliti oleh peneliti terdapat beberapa referensi yang yang dapat dijadikan tinjauan pustaka karna mempunyai kesesuaian tema yang dipilih, beikut peneliti akan mencoba menjabarkan:

Tabel 1.1 Literature Review

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Temuan
1.	Moch Yusuf Syaifudin dan Muhammad Farid Ma'ruf. (2022)	Peran Pemerintah dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa Wisata di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo	Peran Pemerintah Desa Jurug dalam merumuskan kebijakan terkait pengembangan desa wisata sudah baik, namun dalam pelaksanaan program dan pembinaan Pemerintah Desa Jurug masih kurang. Masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan program antara lain kurangnya sosialisasi, masih kurangnya partisipasi masyarakat, alokasi dana, dan permasalahan terkait kotoran hewan yang mencemari aliran sungai. Pemerintah Desa jurug telah memberikan pembinaan di bidang ekonomi, kepemudaan dan agama. Namun pembinaan di bidang kepemudaan dan keagamaan masih belum optimal dimana belum adanya lembaga kepemudaan sebagai wadah pemuda untuk dapat berpartisipasi dalam
2.	Mukhlis, Ervina Eka Subekti, Khusnul Fajriyah, Muhammad Agung (2020)	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Bukit Sulistiyo Di Desa Kalitengah	Warga Desa Kalitengah belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengembangkan industri kreatif yang mendukung pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi industri kreatif sehingga dapat meningkatkan nilai jual yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian disana. GT), memberikan edukasi wisata bagi kelompok GT, pelatihan pembuatan souvenir dengan bahan dasar pasir feldspar, pelatihan pembuatan makanan olahan dari hasil pertanian untuk meningkatkan harga jual, dan membantu perijinan P-IRT
3.	Ni Nyoman Ayu Hari Nalayani (2016)	Evaluasi dan Strategi Pengembangan Desa Wisata di	Dalam penelitian ini ditemukan hasil berupa bagaimana rencana strategi untuk pengembangan bagi kelompok desa wisata yang sedang berkembang, dalam hal ini yakni

		Kabupaten Badung, Bali	Desa Wisata Pangsang yakni memverifikasi produk wisata, Pengelolaan desa wisata yang lebih serius, tetap mempertahankan culture budaya yang unik, peningkatan kualitas SDM, Peningkatan kerjasama antar sector pendukung pariwisata, Peningkatan promosi dalam pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan lingkungan .selanjutnya jika membandingkan rencana strategi pengembangan desa wisata yang belum berkembang (Desa Wisata Belok) adalah penganekaragaman atraksi wisata, pemberdayaan kelompok sadar wisata, mencari potensi yang berbeda dengan desa wisata lainnya, mengemas atraksi wisata sebagai bahan promosi, meningkatkan promosi, penyuluhan tentang desa wisata, membentuk pengelola desa wisata, pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan keamanan lingkungan dan peningkatan sarana transportasi.
4.	Yuni Ratnasari, Dian Kagungan	Pengentasan Kemiskinan Desa Pesisir Melalui pitimalisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Berbasis Kearifan Lokal dan Penguatan Kelembagaan Desa dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Didalam hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa terdapat beberapa langkah yang dilakukan guna mengentaskan kemiskinan di Desa Pesisir yakni : Peningkatan ekonomi masyarakat melalui konsep pemanfaatan kawasan ekowisata yang diwujudkan melalui berbagai pelatihan Selanjutnya yakni dalam peningkatan kapasitas kelembagaan yang ada di tingkat desa seperti mendorong lembaga pekon/desa untuk memahami peran dan fungsinya, memperkuat kelembagaan desa/pekon yang terbuka dalam arti melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan, selanjutnya yakni melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengelolaan kawasan wisata yang dilanjutkan melalui berbagai pelatihan, penanaman mangrove, terumbu karang, adapun langkah terakhir yakni

			<p>pengelolaan kawasan wisata yang dilanjutkan melalui berbagai pelatihan, penanaman mangrove, terumbu karang, adapun langkah terakhir yakni pengelolaan wilayah pesisir melalui pengembangan ekowisata Teluk Kiluan dan melakukan berbagai langkah untuk pendistribusian di berbagai media</p>
5.	<p>Nurdiana Mulyatini, Marlina Nur Lestari (2018)</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Kawasan Wisata Sungai Cireong Kabupaten Ciamis Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan</p>	<p>Kegiatan pengabdian dilakukan dengan cara memberikan penjelasan pada pengurus kawasan wisata mengenai kewirausahaan dan manajemen strategi dalam mengembangkan kawasan wisata. Kegiatan pengabdian dilakukan langsung di kawasan wisata sungai Cireong. Hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian ini pengurus kawasan wisata mendapatkan pengetahuan mengenai kewirausahaan, sehingga akan tercipta ide bisnis serta strategi untuk dapat mengembangkan kawasan tersebut yang ke depannya akan menjadi kawasan wisata yang berkembang dan berkelanjutan. Hal tersebut akan menjadi pendorong perekonomian di daerah dan selanjutnya dapat mengentaskan kemiskinan.</p>
6.	<p>Dinar Wahyuni (2018)</p>	<p>Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul</p>	<p>Melalui pendekatan deskriptif kualitatif terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi oleh Karang Taruna Desa sampai akhirnya Nglanggeran disepakati sebagai desa wisata. Pengkapasitasan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan seputar manajemen desa wisata. Masyarakat kemudian disatukan dalam wadah organisasi, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. Pokdarwis menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan musyawarah sebagai bentuk</p>

			<p>pengkapasitasan sistem nilai. Tahap pendayaan diberikan kepada masyarakat yang telah mempunyai kapasitas Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah sehingga tercapai kemandirian. Desa Nglanggeran banyak mendapat bantuan untuk pembangunan sarana pendukung wisata maupun pengembangan usaha wisata dari berbagai pihak. Strategi pemberdayaan masyarakat berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya telah meningkatkan PAD Gunung Kidul melalui retribusi tiket</p>
7.	<p>Maria Bernadetha Ringa, Nyoman Djinar Setiawina, Made Heny Urmila Dewi, A.A.I.N. Marhaeni (2019)</p>	<p>Peran Pemerintah, Sektor Swasta Dan Modal Sosial Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur</p>	<p>peran pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap partisipasi masyarakat. Hal ini berarti semakin baik peran pemerintah maka partisipasi masyarakat akan semakin tinggi. Peran pemerintah terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan. Partisipasi masyarakat terhadap pariwisata berkelanjutan, semakin tinggi partisipasi masyarakat akan menunjang peningkatan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Kupang. Dengan dimediasi oleh partisipasi masyarakat maka variabel peran pemerintah, peran swasta dan modal sosial dapat dikatakan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat mendorong swasta dan pemerintah serta modal sosial dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan</p>
8.	<p>Alfrojems, Triyanti Anugrahini (2019)</p>	<p>Pengentasan Kemiskinan Perdesaan Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Media Sosial</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah melakukan upaya pengentasan kemiskinan pedesaan melalui pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata dan modal sosial sebagai berikut: 1. Membentuk sinergi antara ekonomi kreatif, pariwisata dan modal sosial masyarakat sebagai satu kesatuan dalam</p>

		<p>upaya mengentaskan kemiskinan di pedesaan;</p> <p>2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan penting dalam proses pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata di daerahnya;</p> <p>3. Mengembangkan potensi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di masyarakat dengan fokus pada pengembangan modal sosial seperti: Memanfaatkan dan mengembangkan kelompok dan jaringan masyarakat lokal, Memanfaatkan dan mengembangkan kepercayaan dan solidaritas masyarakat lokal, Memanfaatkan dan mengembangkan aksi kolektif dan komunitas lokal kerjasama, Pemanfaatan dan pengembangan informasi dan komunikasi masyarakat lokal, Pemanfaatan dan pengembangan kohesi sosial dan inklusi masyarakat lokal, Pemanfaatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat lokal dan aksi politik.</p> <p>4. Memfasilitasi pengembangan program dengan melibatkan partisipasi masyarakat terutama dalam menentukan fokus utama yang akan dilaksanakan berdasarkan potensi sumber daya daerah setempat;</p> <p>5. Mengembangkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan tertentu dalam mengembangkan program berbasis ekonomi kreatif, pariwisata dan modal sosial;</p> <p>6. Memberikan pendidikan sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia bagi masyarakat setempat;</p> <p>7. Memfasilitasi pengembangan produk unggulan yang menjadi ciri khas atau kekuatan daerah dengan memperhatikan kelestarian dan upaya peningkatan kualitas produk tersebut;</p>
--	--	--

			8. Memfasilitasi upaya promosi yang dilakukan oleh masyarakat setempat
9.	Oman Sukmana (2018)	Strategi Percepatan Pertumbuhan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan Pengembangan Pariwisata	Adapun dalam jurnal nya mendapatkan hasil sebagai berikut Community-Based Tourism (CBT) merupakan strategi yang dianggap tepat dalam pengembangan pariwisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan pariwisata, khususnya pariwisata alam dan budaya, yang bisa dijadikan modal dalam upaya mengurangi kemiskinan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan secara konseptual tentang keterkaitan antara pengembangan pariwisata, pertumbuhan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan.
10.	Sukarno Wibowo, Odang Rusmana, Zuhelfa, Syaeful Muslim	Pengembangan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata	Dalam penelitian ini membahas terkait pengaruh pengembangan Industri pariwisata untuk pengembangan kawasan di sekitar objek wisata,sehingga dapat bertindak sebagai industry yang terkemuka,sector-sektor yang dapat meningkatkan perekonomian.Keberadaan sector pariwisata akan dapat menciptakan lapangan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan wisata.Ketika dikaitkan dengan perkembangan ekonomi dengan pertumbuhan yang seimbang,pariwisata dapat diharapkan untuk memegang peran yang menentukan dan dapat digunakan sebagai katalis untuk mengembangkan sector pembangunannya.Sementara itu,dampak ekonomi perkembangan pariwisata bisa positif atau negative.Dampak positifnya adalah menciptakan lapangan kerja,meningkatkan pendapatan masyarakat dikawasan wisata sekitar.Sedangkan dapat negatifnya terhadap lingkungan adalah lingkungan alam,terbangun dan budaya
11.	Dias Endar Pratama (2017)	Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen Dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam

		Pengentasan Kemiskinan Melalui Sektor Pariwisata	mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata meliputi; (1) program pengembangan desa wisata; dan (2) program pengembangan destinasi wisata. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengentaskan kemiskinan melalui sektor pariwisata diantaranya meliputi; (1) kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen, (2) keterbatasan anggaran dana; (3) kurangnya dukungan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
12.	Dias Satria (2019)	Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang	Pengembangan ekowisata di Pulau Sempu belum maksimal dan mungkin harus dapat melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah s proses didalamnya. Hal ini dilakukan guna memberikkan ruang yang luas bagi masyarakat setempat untuk menikmati keuntungan secara ekonomi dari pengembangan ekowisata di wilayah ini, pentingnya peningkatan kerjasama ecara optimal dalam setiap proses- dengan institusi dan lembaga terkait yang diharapkan untuk memperkuat konsep ekowisata di wilayah Pulau Sempu.
13.	Ni Made Andriani, I Made Yoga Suandita, Ni Made Arini ³ , Ni Luh Pegy Teristonia ⁴ , I WayanWidiana (2021)	Pengentasan Kemiskinan melalui Social Entrepreneurship Berbasis Industri Kreatif dan Desa Wisata di Dusun Munti Gunung, Desa Tianyar Barat	Adapun hasil dari kegiatan ini mencakup terciptanya sebuah komunitas social entrepreneurship yang berbasis industry kreatif dan desa wisata untuk mewedahi masyarakat miskin di Dusun Munti Gunung. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan kemiskinan yang ada di DusunMunti Gunung, Desa Tianyar Barat
14.	Lia Siti Maulida (2019)	Peran Pengelola Agrowisata Dalam Mengentaskan Kemiskinan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengelola agrowisata sangatlah penting mulai dari

		Masyarakat Pedesaan	perencanaan maupun pengelolaan hingga pemasaran produk dari agrowisata ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Cihideung
15.	Marlina Nur Lestari , Nina Herlina (2019)	Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Kawasan Wisata Sungai Cireong Kabupaten Ciamis Dalam Rangka Pengentasan	Dari hasil penelitian adapun hasil yang didapatkan yakni pengurus dari kawasan wisata mmendapatkan ilmu mengenai kewirausahaan yang mana dari hal ini terdapat output ide bisnis yang meliputi strategi untuk dapat mengembangkan kawasan tersebut yang mana nantinya kawasan tersebut akan menjadi kawasan wisata yang berkembang dan berkelanjutan.dilain sisi nantinya menjadi pendorong bagi roda perekonomian di daerah dan dapat menyelesaikan permasalahan terkait kemiskinan.

Dari beberapa kajian penelitian yang telah dilampirkan diatas ditemukan bahwa keterkaitan peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mendukung pengembangan sector pariwisata yang ada diberbagai desa , pengembangannya pun beraneka ragam , mulai dari pengembangan melalui social media ,Pelatihan berbasis ekonomi kreatif, Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community-Based Tourism) dll.Namun hal ini juga tidak terlepas dari keaktifkan dan campur tangan dari masyarakat sekitar.Perbedaan yang ditemukan peneliti adalah terlihat dari lokasi yang akan diteliti serta melihat secara langsung bagaimana program yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat di desa wisata Kasongan dalam mendukung pariwisata dan mengentaskan

kemiskinan, melihat viral nya wisata gerabah yang digandrungi kaula muda yang mana dalam hal ini sangat berpotensi dalam memajukan industry pariwisata dan ekonomi kreatif.

1.7. Kerangka Teori

Pada kerangka teori ini akan dijelaskan bagaimana peneliti akan menggunakan kerangka yang berkorelasi dengan judul. Kerangka teori merupakan kerangka dan acuan tentang suatu konsep, atau pada dasarnya suatu dimensi, dan sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil berpikir (Maulana, 2021). Akan ada beberapa kerangka teori dan akan dijelaskan sebagai berikut.

1.7.1 Pengentasan Kemiskinan

a. Program Pengentasan Kemiskinan

Kata program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan. Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Arikunto (2004) mengemukakan ada dua pengertian istilah program yaitu pengertian secara khusus dan umum menurut pengertian secara umum program dapat diartikan sebagai rencana. Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu sebuah

program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Selanjutnya Arikunto (2004) mengemukakan pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali melainkan berkesinambungan Apabila program ini langsung dikaitkan dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan berlangsung dalam proses berkesinambungan. Terdapat tiga pengertian perlu ditekankan dalam menentukan program yaitu:

- (1) realisasi atau implementasi suatu kebijakan,
- (2) terjadi dalam waktu relatif lama,
- (3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Pengentasan berasal dari kata dasar “entas”. Kata “entas” dalam KBBI diartikan sebagai mengangkat (dari suatu tempat ke tempat lain): mengeluarkan dari lingkungan; menyadarkan; memperbaiki nasib. Pengentasan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengangkat atau mengeluarkan atau menyadarkan atau memperbaiki nasib. Kemiskinan berasal dari kata dasar “miskin”. Kata “miskin” dalam KBBI diartikan sebagai tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kemiskinan kemudian diartikan sebagai hal, keadaan, atau situasi tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Pemahaman mengenai “kemiskinan” mestilah beranjak dari pendekatan berbasis hak (right based approach). Dalam pemahaman ini harus diakui bahwa seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Kemiskinan juga harus dipandang sebagai masalah multidimensional, tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Pendekatan *right based approach* mengandung arti bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bab 1 Ketentuan Umum ayat 1: Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, “penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium”. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, “dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan”. Berdasarkan uraian di atas, program pengentasan kemiskinan merupakan suatu unit atau kesatuan rancangan atau rencana kegiatan

mengenai proses, cara, perbuatan mengangkat atau mengeluarkan atau menyadarkan atau memperbaiki hal, keadaan, atau situasi tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. . Unit atau kesatuan rancangan atau rencana kegiatan tersebut dilakukan bukan hanya satu kali melainkan berkesinambungan, dapat berlangsung dalam kurun waktu relative lama. Hal ini merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat.

Kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis.

a) Kemiskinan ekonomi

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

b) Kemiskinan politik

Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power). Kekuatan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan resources.

c) Kemiskinan sosial-psikologis

Secara sosial-psikologis, kemiskinan menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktifitas.

b. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhankebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sendiri. Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan

diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau 30 mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerahdaerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif. Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negaranegara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya (Jarnasy, 2004: 8-9)

c. Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan

Kuncoro dalam Sharp, et al (1996) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi yaitu:

1) Ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya

Daerah yang pada umumnya kekurangan sumber daya baik SDM ataupun SDA, akan terbatas dalam pengelolaannya dibandingkan dengan daerah yang tersedia cukup banyak sumber daya. Keterbatasan pengelolaan sumber daya akan mempengaruhi kualitas suatu barang yang dihasilkan. Konsumen akan lebih memilih penggunaan kualitas sumber daya yang baik

sehingga daya beli konsumen akan berkurang yang nantinya akan berpengaruh pada ketimpangan pendapatan.

2) Kualitas sumber daya manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena faktor keturunan. Kualitas sumber daya yang rendah berpengaruh pada rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas pada gilirannya berpengaruh pada upah yang rendah sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Subandi (2016: 93) mengemukakan bahwa kemajuan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari produktivitas kerja penduduknya. Adapun produktivitas tersebut harus didukung oleh tingkat investasi dan SDM yang memadai. Oleh karena itu untuk mewujudkan perekonomian suatu negara perlu dukungan kualitas SDM yang memadai.

3) Perbedaan akses dalam modal

Modal merupakan salah satu bentuk sumber daya yang dibutuhkan untuk proses produksi. Akses modal yang baik akan meningkatkan produktivitas. Namun, kurangnya akses modal akan menurunkan produktivitas. Penurunan produktivitas akan menurunkan tingkat pendapatan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan.

d. Model Solusi Pengentasan Kemiskinan

Salah satu pengalaman di Negara Negara Asia menunjukkan bahwa model mobilisasi perekonomian pedesaan untuk memerangi kemiskinan yaitu : Pertama, Mendasarkan pada mobilitas tenaga kerja agar terjadi pembentukan modal di Pedesaan. Dalam hal ini Tenaga kerja yang masih belum di dayagunakan pada rumah tangga petani kecil dan gurem merupakan sumberdaya yang tersembunyi dan memiliki potensi investasi. Alternatif cara untuk memobilisasi tenaga kerja dan tabungan pedesaan diantaranya adalah: Pertama, menggunakan pajak langsung atas tanah, seperti yang dilakukan di Jepang. Kedua, dilakukan dengan menyusun kerangka kelembagaan di perdesaan yang memungkinkan tenaga kerja yang belum termanfaatkan untuk akumulasi modal tanpa perlu menaikkan upah. Inilah yang dilakukan Cina, yang telah menerapkan sistem kelompok kooperatif dan brigade di tingkat daerah (komune) terendah. Metode ini ternyata memungkinkan peningkatan substansial dalam intensitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja. Model kedua berfokus pada pengalihan kekuasaan dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar petani kecil dapat meningkatkan tabungan dan pembentukan modal melalui proses pasar. Model ketiga, menonjolkan pertumbuhan pesat di sektor pertanian yang dibuka oleh kemajuan teknologi dan kemungkinan adanya sektor unggulan (Mellor, 1976), model ini dikenal dengan Model Pertumbuhan Berbasis Teknologi, atau Rural- Development .Led. Kemiskinan dapat diatasi dengan kemudahan akses ke dua bidang, yaitu: 1) bidang ekonomi dan 2) bidang sosial (Kuncoro, 2004).

Tujuan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada Bab 3 tentang Strategi dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, bagian satu , pasal 3 adalah:

- a) pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin;
- b) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
- d) sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Sasaran program pengentasan kemiskinan daerah adalah mengurangi jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Indikator ini diukur berdasarkan angka kemiskinan regional.

Dalam pelaksanaan suatu program juga perlu diperhatikan bagaimana evaluasi terhadap keluarnya program tersebut dilakukan. Evaluasi program itu sendiri adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menjawab pertanyaan dasar tentang program (Wirawan, 2011). Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses, evaluasi hasil, dan evaluasi dampak. Karena fokus utama penelitian berkaitan dengan kepentingan masyarakat, maka yang dianggap sangat cocok adalah yang berkaitan dengan evaluasi manfaat, yaitu meneliti, menilai dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diinginkan. Evaluasi manfaat merupakan evaluasi sumatif yaitu mengukur dan menilai output dan efek atau efek dari program. Data yang dikumpulkan meliputi:

- a) Apakah hasil atau keluaran program sesuai dengan yang direncanakan
- b) Jumlah dan jenis orang yang dilayani sesuai dengan rencana
- c) Pengaruh atau pengaruh program terhadap masyarakat yang mendapatkan pelayanan, apakah ada perubahan atau perbedaan dari sebelum dan sesudah mendapatkan pelayanan program
- d) Evaluasi manfaat (outcome) juga mengidentifikasi apa yang harus dilakukan agar program dapat berlanjut.

1.7.2 Konsep Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sumber yang memiliki potensi untuk dikembangkan oleh setiap daerah untuk menumbuhkan perekonomian suatu daerah. Pariwisata dapat membawa keuntungan yang cukup besar ke daerah tersebut. Istilah pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata “pari” yang berarti lengkap, banyak, berputar-putar, kata “wisata” yang berarti perjalanan, perjalanan. Jadi secara gramatikal “pariwisata” adalah perjalanan yang lengkap (Karyono, 1997:1). Menurut Wiwoho (1990:23) pariwisata adalah suatu proses perjalanan sementara dari seseorang atau lebih ke suatu tempat di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya karena berbagai kebutuhan seperti ekonomi, sosial, keagamaan, kesehatan atau kebutuhan lainnya yang ingin tahu dan menambah pengalaman atau pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perpindahan orang yang

melakukan perjalanan atau singgah sementara dari tempat tinggalnya ke suatu tempat atau beberapa tujuan di luar lingkungannya yang didorong oleh beberapa kebutuhan atau motif tanpa bermaksud menjadikan tempat tinggal tetap di tempatnya atau hanya singgah.

b. Produk Jasa Pariwisata

Menurut Freyer dalam Damanik et'al (2006:11) produk jasa pariwisata adalah semua produk jasa yang dimaksudkan atau dikonsumsi oleh seseorang selama kegiatan pariwisata. Selanjutnya menurut Plog dalam Damanik dkk (2006:13) yang menilai kualitas produk jasa pariwisata adalah wisatawan itu sendiri, karena mereka adalah pengguna atau konsumen. Menurut Yoeti (1996:13) Pada dasarnya ada tiga kategori produk jasa industri pariwisata, yaitu:

- a) Obyek wisata yang terdapat di daerah tujuan wisata menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk datang dan berkunjung ke daerah tersebut.
- b) Fasilitas yang dibutuhkan di destinasi tersebut, seperti akomodasi hotel, bar dan restoran, hiburan dan rekreasi.
- c) Transportasi yang menghubungkan negara asal pariwisata dengan tujuan wisata serta transportasi di tempat tujuan menuju objek wisata. Selain ciri-ciri di atas, industri pariwisata juga memiliki jenis-jenis. Menurut Pandit (1990:36)

c. Karakteristik Pariwisata

Karakteristik pariwisata sebagai suatu kegiatan yang membuat pariwisata sangat relevan dengan negara-negara berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin di dalam negara tersebut, yaitu;

a) Pariwisata merespon terhadap asset tertentu.

Pariwisata memberikan nilai yang bagus pada beberapa hal umum dari negara-negara berkembang, seperti iklim yang hangat, warisan budaya yang kaya, pemandangan yang menginspirasi dan keanekaragaman hayati yang melimpah.

b) Aksesibilitas masyarakat miskin.

Pariwisata merupakan sector yang relatif padat karya dan secara tradisional terdiri dari usaha kecil dan mikro. Banyak kegiatan dibidang pariwisata sangat cocok untuk wanita, kaum muda, dan kelompok yang kurang beruntung seperti populasi etnis minoritas. Banyak pekerjaan dibidang pariwisata yang berpotensi untuk masyarakat miskin, karena mereka memerlukan relatif sedikit keterampilan dan sedikit investasi.

c) Konektivitas.

Terdapat banyak kegiatan yang berbeda dan masukan untuk membuat produk wisata, yang memiliki rantai pasokan yang besar dan beragam, pengeluaran oleh wisatawan bisa menguntungkan berbagai sector seperti pertanian, kerajinan, transportasi dan jasa lainnya.

d) Pariwisata menghubungkan konsumen kepada produsen.

Pariwisata merupakan kegiatan yang membawa konsumen ke produsen. Interaksi antara wisatawan dan masyarakat miskin dapat memberikan beberapa manfaat. Hal tersebut dapat berupa peningkatan kesadaran akan masalah budaya, lingkungan, ekonomi yang dapat memicu adanya peningkatan investasi lokal dibidang infrastruktur. Telah dibuktikan pada beberapa penelitian bahwa pariwisata memegang peranan penting dalam pengurangan kemiskinan. Banyak negara dengan penduduk miskin menyatakan ketergantungan pada sektor pariwisata, meskipun sektor pariwisata belum mampu untuk menghilangkan kemiskinan, namun berbagai studi kasus menunjukkan bahwa masyarakat miskin memperoleh manfaat dari sektor pariwisata (Anwar, 2012). Manfaat yang diterima seringkali sangat kecil apabila diukur dengan standar atau kebutuhan, tetapi kesempatan dan manfaat kecil tersebut sangat berarti bagi masyarakat miskin (Deller, 2010) . Manfaat yang dimaksud dapat berbentuk manfaat finansial dalam bentuk pendapatan individu maupun kelompok dan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan. Manfaat lain bervariasi mulai dari peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana yang dibangun untuk pariwisata yang dapat digunakan oleh masyarakat, manfaat sosial (pengembangan organisasi masyarakat).

d. Tipe Desa Wisata

Menurut (Antara & Arida, 2015) desa wisata memiliki pola, proses dan tipe pengelolaannya, di Indonesia sendiri memiliki dua tipe diantaranya:

1) Tipe daerah kantong (enclave).

Tipe kantong ditandai oleh karakter sebagai berikut:

- a) Keterbatasan lahan yang dilengkapi dengan infrastruktur khusus untuk kawasan tersebut. Tipe ini memiliki kelebihan pada citra yang ditumbuhkannya, sehingga mampu menembus pasar internasional.
- b) Lokasi umumnya terpisah dari masyarakat atau penduduk setempat, sehingga diharapkan dampak negatifnya dapat dikendalikan. Selain itu, pencemaran sosial budaya yang diakibatkannya akan dapat dideteksi secara dini.
- c) Lahannya tidak terlalu luas dan masih dalam taraf kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinasi, sehingga diharapkan mampu menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana internasional sebagai unsur utama untuk “menangkap” layanan bintang lima. hotel. Contoh kawasan atau desa wisata jenis ini adalah kawasan Nusa Dua, Bali. Pedesaan diakui sebagai pendekatan yang tidak hanya berhasil secara nasional, tetapi juga internasional.

2) Tipe Terbuka (spontaneous).

Tipe Terbuka ditandai dengan karakter karakter yakni tumbuh menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan masyarakat sekitar. Distribusi pendapatan yang didapat dari wisatawan dapat

langsung dinikmati penduduk local, namun hal ini memiliki dampak negative yang cepat menyebar luas menjadi satu dalam penduduk local, sehingga dalam hal ini sulit untuk dikendalikan. Adapun untuk dari contoh tipe perkampungan wisata jenis ini adalah kawasan yang berada di Prawirotaman, Yogyakarta.

1.8. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah definisi yang dipakai oleh peneliti dalam menentukan ruang lingkup suatu masalah yang nantinya akan dijadikan variable dalam proses penelitian. Konsep tersebut nantinya akan penulis jadikan sebagai pedoman dalam mengoperasionalkannya di lapangan, yang selanjutnya dapat memudahkan dan mengkontekstualisasikan teori yang digunakan. Oleh karena itu, maka ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

1.8.1. Program Pengentasan Kemiskinan

Program untuk pengentasan kemiskinan merupakan suatu hal atau sebuah rancangan atau juga rencana dalam kegiatan mengenai proses, cara, perbuatan mengangkat atau mengeluarkan atau menyadarkan atau memperbaiki keadaan, kondisi, hal atau situasi tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat minim) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin melalui bantuan social, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.

1.8.2. Pariwisata

Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan.

1.9. Definisi Operasional

Menurut Nani Darmayanti (dalam Mushlihin 2013) definisi operasional adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian karya ilmiah. Dalam hal ini peneliti memasukkan beberapa teori yang dikemukakan oleh wirawaran yang mana variable, indikator dan parameter nya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Variable, Indikator, Parameter

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Program pemerintah dalam pengentasan keimisknan	Efektivitas program	Hasil atau keluaran program apakah sesuai dengan yang direncanakan.
		Kecukupan terhadap perataan dalam pelaksanaan program	Jumlah dan jenis orang yang dilayani apakah sesuai dengan direncanakan
		Ketepatan program	Pengaruh atau akibat dari program terhadap orang yang mendapatkan layanan, apakah terjadi perubahan

			atau perbedaan dari sebelum dan sesudah mendapatkan layanan program.
--	--	--	--

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini terfokus pada mengetahui sejauh apa program pemerintah dalam mengembangkan pariwisata sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Wisata Kasongan, Karena masalah, tujuan, dan karakteristik penelitian ini berhubungan dengan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maka dipandang lebih tepat diselesaikan dengan mempergunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Sugiyono, 2010). Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pedoman studi pustaka dan wawancara. Penentuan informan menggunakan Teknik Purposive Sampling. Kemudian menguji keabsahan data dengan Teknik Triangulasi. Selanjutnya sumber data dari informan yang ditunjuk melalui tahap proses klasifikasi dan reduksi data, lalu proses pengolahan data dan terakhir proses analisis data dan perumusan hasil penelitian dan kesimpulan. Pendekatan yang peneliti ambil berupa deskriptif yang mana seluruh data dan proses analisis akan memperlihatkan bagaimana

strategi yang di ambil pemerintah dalam mengembangkan desa wisata kasongan sebagai bentuk usaha pemberantasan kemiskinan

1.10.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diambil oleh peneliti terletak di Desa Wisata Kasongan kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Pemilihan lokasi ini didasari oleh belum banyaknya penelitian terkait sejauh apa program yang dikeluarkan pemerintah dalam pengembangan desa wisata tersebut serta melihat bagaimana fenomena viralnya wisata gerabah akhir akhir ini yang banyak digandrungi oleh kaula muda

1.10.3 Unit Analisa Data

Unit analisa data merupakan bagain dari isi yang akan diteliti lebih dalam yang kemudian disederhanakan. Dengan kata lain, unit analisa data ini merupakan subjek yang akan dianalisis dalam penelitian. Maka dari itu, analisa data dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Bangunjiwo dan pengelola wisata. Karena hal ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh strategi pemerintah setempat dalam mengembangkan Desa Wisata Kasongan

1.10.4 Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dapat dilihat sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer akan digunakan oleh peneliti, sebab akan terjun langsung untuk melakukan pengambilan data. Salah satunya dengan cara wawancara dengan beberapa pihak, seperti Kepala Lurah Desa Bangunjiwo, Pengelola Wisata di Desa wisata Kasongan. Hal ini ditujukan agar dalam mendapatkan data dapat asli dan lebih rinci. Selain itu untuk mengetahui bagaimana kondisi wisata disana saat ini

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa sumber diantaranya buku, jurnal, arsip, data atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti. Data ini juga digunakan untuk memperkuat atau memperjelas data yang dirasa masih kurang.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah yang krusial dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan sebuah data (Sugiyono, 2010). Berikut merupakan teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Teknik atau metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih detail yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Bagaimana peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan pertanyaan yang sudah disiapkan kepada narasumber ataupun responden. Perlu diingat juga dalam melakukan wawancara perlu menyiapkan pertanyaan, pencatatan dan dokumentasi. Demi menjaga kelengkapan informasi,

peneliti akan melakukan rekaman suara melalui telepon dengan izin narasumber atau responden. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data Narasumber

No	Instansi	Jumlah	Narasumber
1.	Pemerintah Desa Kalurahan Bangunjiwo dan Pengelola Desa Wisata Kasongan	3	a. Lurah Desa Bangunjiwo b. Kepala Pengelola Desa Wisata Kasongan c. Kasi Kesejahteraan
2.	Stakeholder	6	Pemilik UMKM di Desa Wisata Kasongan

Peneliti memilih kedua instansi tersebut karena berkaitan dengan topik penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, serta data yang dapat menunjang penelitian tersebut. Dokumentasi yang dikumpulkan untuk digunakan peneliti berupa data dari website pemerintah, berita ataupun artikel terkait Desa Wisata Kasongan untuk membandingkan program apa saja yang telah dilakukan

1.10.6 Teknis Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan sebagai upaya menyusun data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori dan menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012 : 89). Adapun teknik analisis data dalam metode penelitian kualitatif antara lain wawancara, reduksi data, penyajian data menggunakan dokumen asli daerah, dan kesimpulan dari data-data yang disajikan. Kemudian untuk menguji keabsahan data dengan Teknik Triangulasi, menurut Sugiyono (2015:241) triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan dan sumber data yang telah ada. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber

